

BAB II

DESKRIPSI POLITIK LUAR NEGERI PRANCIS DAN DINAMIKA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Prancis merupakan salah satu negara maju yang memiliki karakter politik-pemerintahan yang relatif stabil. Keberadaan Prancis sebagai negara demokratis berhasil mencapai taraf politik yang mapan melalui pengalaman sejarah yang panjang. Dalam konstelasi politik internasional Prancis memiliki posisi tawar (*bargain position*), terkait dengan posisinya dalam keanggotaan Uni Eropa hingga kapasitasnya sebagai pemegang hak veto.

Pada periode 2012-2016, politik luar negeri Prancis dihadapkan pada konflik Palestina-Israel. Pada dasarnya konflik ini merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak dekade 1950-hingga 1960-an, namun hingga akhir tahun 2016 rekonsiliasi konflik masih belum dapat tercapai secara mendasar akibat kompleksnya persoalan yang terjadi, termasuk adanya kepentingan dan intervensi asing dalam konflik di Timur-tengah tersebut. Pada Bab II ini akan diuraikan lebih lanjut tentang politik luar negeri Prancis terhadap konflik Israel-Palestina.

A. Politik Luar Negeri Prancis

Prancis merupakan negara terluas di Benua Eropa. Dengan luas 543.965 km², Prancis merupakan negara terluas di wilayah Eropa. Lertak Astronomis Prancis adalah 42°LU–51°LU dan 5°BB–9°BT. Adapun batas negara ini adalah di sebelah barat berbatasan dengan negara Jerman, Swiss, dan Italia. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Inggris dan Belgia. Adapun di selatan berbatasan dengan

Laut Mediterania dan negara Spanyol.²³ Negara ini memiliki perekonomian yang kuat dengan didukung oleh industri dan pertanian yang maju. Gambaran mengenai posisi geografis Prancis sebagai berikut: lihat Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Wilayah Geografis Prancis



1.1.2

Sumber: Maps of France, <http://www.map-france.com/regions/> , diakses pada 6 Maret 2017.

Prancis merupakan sebuah negara Republik yang berbentuk negara kesatuan. Prancis menganut sistem pemerintahan Semi-Presidensial yang berarti bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden berperan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh seorang Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden. Berbeda dengan sistem

²³ France Country Profile, <http://www.bbc.com/news/world-europe-17298730>, diakses pada 30 Juni 2017.

pemerintahan Presidensial, yang berarti Presiden secara murni menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu oleh Kabinet.²⁴ Bentuk pemerintahan Prancis adalah Republik Parlementer, yang berarti bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan Perdana Menteri berada di bawah kekuasaan Presiden. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali, sedangkan Perdana Menteri dipilih langsung oleh Presiden. Dan Badan legislative di Prancis terdiri dari dua bagian yaitu Senat dan *National Assembly*.

Prancis merupakan negara yang mengadopsi sistem multi-partai. Politik domestik didominasi oleh persaingan dua blok partai, yaitu Sayap Kiri (*Gauche*) terdiri dari Partai-partai yang menganut Sosialisme, demokrasi sosial, dan komunisme; dan Sayap Kanan (*Droite*) terdiri dari Partai-partai yang menganut Konservatisme, Liberal Klasik, dan Kelompok Agama. Partai-partai di Prancis terdiri dari *Socialist Party, The Republicans, National Front, Left Front, French Communist Party, Together, Left Party, Europe Ecology The Greens, New Centre, Democratic Movement, Radical Party of the Left, Radical Party, Centrist Alliance,* dan *Movement for France*.²⁵ Sistem multi-partai di Prancis tiyusudak menimbulkan adanya dominasi partai tunggal. Maka dari itu di dalam sistem multi-partai seperti Prancis diperlukannya koalisi untuk memenuhi tujuannya, yaitu memenangkan pemilihan umum.²⁶ Kemudian dalam urusan legislatif, Prancis menggunakan sistem parlemen dua pintu (bikameral) yang terdiri dari *National Assembly* (sidang

²⁴ P. Perineau, *Politic in France and Europe*, Palgraff Mc Millan Publishing, New York, 2009, hal.15-16.

²⁵ Political Parties in France with a comparison to political parties Britain and in the USA <http://about-france.com/political-parties.htm> Diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

²⁶ *Ibid*,

Nasional) dan *Parliament Sovereignty* (Senat Tidak Berpendapat). Hal ini berbeda dengan Indonesia yang mempunyai sistem legislatif trikameral (tiga pintu). Di Prancis, parlemen dapat membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Walaupun demikian, Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara *electoral college* yang terdiri dari wakil-wakil daerah / kota.²⁷

Konstitusi yang dianut oleh Prancis adalah konstitusi tertulis. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, konstitusi Prancis ini lebih kaku. Terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif yang ada di tangan Parlemen, Eksekutif di tangan Presiden, dan Yudisial di tangan Badan Kehakiman. Mengenai Badan Kehakiman, para hakim ini diangkat oleh Eksekutif dan terbagi menjadi dua, yaitu Peradilan Kasasi (*Court of Casation*) dan Peradilan Hukum Administrasi. Dalam perkara-perkara yang rumit dan berat, penanganannya akan dilakukan oleh *Tribunal des Conflits*.²⁸

1. Posisi Prancis Dalam Politik Global

Prancis merupakan negara yang terletak di Benua Eropa. Pada masa lalu Prancis menganut sistem politik yang berbentuk negara Monarki Absolut. Awalnya tidak terjadi masalah tapi pada akhir masa sistem politik monarki, tepatnya pada zaman Raja Louis XIV rakyat sudah tidak betah dengan keadaan yang dimana raja

²⁷ *Ibid.*

²⁸ ICL France Constitution Republic, <http://www.equalrightstrust.org/content/france-constitution-french-republic>, diakses pada 4 Maret 2017.

bertindak semena mena. Pada tahun 1789 rakyat terutama para buruh berusaha menggulingkan pemerintahan Raja Louis XIV dengan menghancurkan Penjara Bastille yang menjadi lambang monarki Prancis sejak itulah sistem politik Prancis yang monarki telah berakhir.²⁹ Kemudian pengaruh Prancis dalam konstelasi global juga berhasil diperoleh melalui Kolonisasi. Beberapa diantaranya adalah Mali, Aljazair, Nigeria dan beberapa negara lainnya. Sebagian diantaranya berhasil dikembangkan dalam kerangka kerjasama mutualistik.³⁰

Prancis merupakan salah satu dari sedikit negara anggota EU yang masih memiliki ambisi dalam politik luar negerinya. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena dengan adanya krisis ekonomi, banyak negara Eropa yang lebih membangun domestiknya. Jika negara-negara Eropa tersebut melakukan politik luar negeri, tidak lebih dari sebatas kepentingan ekonomi, seperti ekspor atau menerima investasi asing. Prancis dikatakan sebagai salah satu negara EU yang aktif dalam politik luar negerinya dapat dilihat dari hubungan diplomasi bilateral maupun multilateralnya. Prancis aktif dalam organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, EU, dan NATO. Di dalam PBB, Prancis merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto.

Prancis dan Jerman dianggap sebagai dua negara terdepan dan terkuat dalam EU, dimana kedua memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Prancis menggunakan kebijakan moneter bersama Eropa, Euro dan

²⁹ William Young, *International Politic and Warfare in the Age Louise XIV*, I Universe Inc, New York and Lincoln, 2007, hal.21.

³⁰ *Ibid.*

kebijakan territorial Schengen yang membuat timbulnya masalah mengenai imigran di Prancis. Pengaruh Prancis di EU juga terlihat dari jumlah vote yang dimiliki oleh Prancis yakni sebanyak 29 vote. Prancis dan Jerman sendiri pernah mengeluarkan kebijakan anti dukungan terhadap Amerika dalam menginvasi Irak dan berbeda pendapat dengan Italia yang mendukung penuh kebijakan Amerika Serikat tersebut. Hal ini membentuk kerenggangan hubungan antara Italia dengan Prancis dan Jerman.

2. Mekanisme Kebijakan Luar Negeri Prancis

Secara umum politik luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Politik luar negeri telah mempunyai beberapa definisi antara lain sebagai perwujudan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan di forum internasional. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri. Konsep ini juga berlaku bagi Prancis.

Prancis terus mempertahankan mekanisme bilateral dan multilateralisme di tingkat global dengan kekhasan seperti promosi hak asasi manusia dan penekanan pada kebijakan budaya. Visi ini adalah produk dari kebijakan global yang didasarkan pada rasa universalisme yang berasal dari revolusi Prancis dan menjadi kekuatan global sebagai konsekuensi dari pengalaman kolonial dan kepemilikan bom nuklir. Hubungan bilateral sesuai dengan visi ini peran Prancis di dunia.

Sementara itu, Prancis juga memainkan peran kekuatan tengah dalam konteks multilateral. PBB dan Uni Eropa adalah konteks utama di mana Prancis mengembangkan aksinya. Untuk alasan ini dapat diamat melalui transformasi instrumen kebijakan luar negeri Prancis. Kemudian ada beberapa ketegangan antara instrumen nasional, seperti pertahanan otonom dan kemampuan diplomatik, dan inisiatif multilateral. Namun demikian, proses multilateral, dan lebih khusus di Uni Eropa, muncul sebagai kerangka kerja yang realistis untuk dapat mempromosikan kepentingan Prancis di dunia.³¹

Dinamika politik luar negeri Prancis pada periode 2012-2016 juga tidak bisa lepas dari *figure* Presiden Hollande dan perannya dalam meningkatkan sejumlah isu untuk Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Ini mengesankan bahwa kebijakan luar negeri dan kebijakan Uni Eropa telah menjadi semakin terintegrasi daripada dipahami jauh lebih sebagai kebijakan domestik. Dalam politik luar negeri di luar Uni Eropa, Prancis mempertahankan dan mengejar visi tertentu dari dunia yang mungkin berubah secara terbatas namun penting bagi Presiden Hollande. Dalam Uni Eropa, Sarkozy telah menyerah pada kecenderungan alami untuk personalisasi kebijakan dengan terlibat dalam mediasi orang pertama di Eropa, seperti yang dilambangkan oleh Angela Merkel. Sejalan dengan gaya yang berbeda itu, Hollande juga akan mengejar peran kunci mediasi, memajukan Eropanisasi politik dalam negeri Prancis.

³¹ France Foreign Policy, <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/>, Diakses pada 7 Maret 2017.

B. Dinamika Konflik Palestina-Israel

Perkembangan dunia ternyata tidak dapat dilepaskan dari konflik, baik konflik antar negara ataupun konflik domestik yang kemudian dikenal dengan perang sipil (*civil war*). Salah satu konflik yang mengemuka adalah perang antara Israel dan Palestina yang hingga periode 2012-2016 masih menjadi persoalan internasional yang mengemuka dan kemudian menjadi bagian dari obyek intervensi Prancis.

1. Sejarah Konflik Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel ternyata telah melalui serangkaian sejarah panjang. Konflik ini bermula pada bulan Desember 1948. Konflik ini dilatarbelakangi oleh klaim atas sebuah wilayah yang sama di antara kedua belah pihak. Orang-orang Israel percaya bahwa mereka berhak atas tanah yang sekarang dikenal sebagai Israel, sementara orang-orang Palestina percaya bahwa mereka berhak atas tanah yang mereka sebut Palestina, dan kedua belah pihak tersebut saling mengklaim dan memiliki penyebutan yang berbeda. Menurut kaum Yahudi, kata Israel sendiri berasal dari bangsa Yahudi yaitu *Bnei Israel (the people or tribe of Israel)* dan mempercayai bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang telah diberikan kepada kaum bani israil oleh Tuhan. Sedangkan kaum Muslim yang dominan menempati wilayah tersebut dikenal sebagai orang Palestina setelah sebagian penduduk Yahudi dibunuh atau dipaksa pergi oleh bangsa Romawi. Berdasarkan catatan Kekaisaran Ottoman yang paling lama menguasai Palestina dari tahun 1187 hingga 1918, pada tahun 1900 jumlah populasi Palestina adalah 600.000 jiwa dan 94% adalah orang Arab. Pada saat itu, Ottoman melakukan kerjasama dengan bangsa Eropa untuk

meningkatkan perekonomiannya. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi kaum Yahudi di wilayah Eropa untuk kembali ke Palestina dengan gerakan yang dikenal sebagai Gerakan Zionisme³². Kaum Yahudi melakukan pendudukan ke wilayah Palestina dengan cara membeli tanah-tanah kosong di wilayah tersebut. Dan saat itu, banyak orang Arab Palestina bersedia menjual tanah kepada kaum Yahudi yang masuk ke wilayah mereka dengan alasan khawatir akan menjadi kaum minoritas di wilayah yang mereka anggap milik sendiri.³³ Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, pada tahun 1901 Yahudi mendirikan *Jewish National Fund* dengan tujuan untuk melakukan koordinasi dan memusatkan informasi mengenai pembelian tanah yang dilakukan dan memastikan bahwa tanah yang sudah dibeli oleh kaum Yahudi tidak akan pernah dijual kembali.³⁴

Selama Perang Dunia I, McMahon, seorang Komisaris Tinggi Inggris di Mesir mencoba untuk mendorong pemberontakan Arab untuk melawan Kekaisaran Ottoman yang menguasai sebagian besar wilayah Arab. Ia mengirimkan serangkaian surat kepada Sharif Hussein dari tahun 1915 sampai tahun 1916. Dan berjanji bahwa jika orang-orang Arab mendukung Inggris dalam perang, dan Hussein bersedia menjadi pemimpin pemberontakan Arab, maka pemerintah Inggris akan mendukung kemerdekaan wilayah Palestina, Yordania, Suriah, dan Irak. Sedangkan dengan Israel McMahon membuat perjanjian lain yang

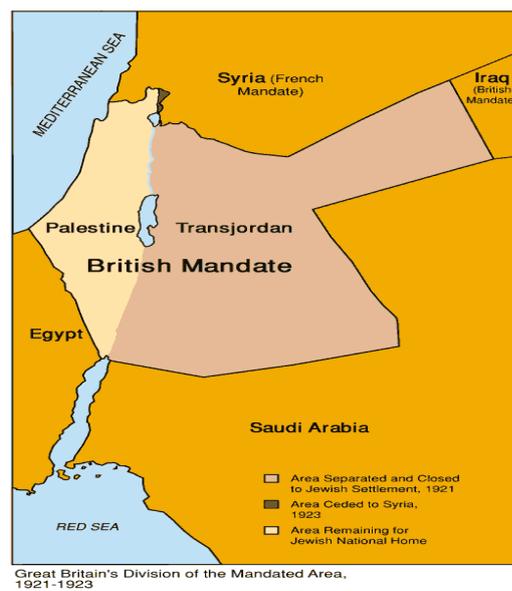
³² Zionisme merupakan gerakan politik modern yang memiliki keyakinan utama bahwa seharusnya ada tanah air atau wilayah bagi orang-orang Yahudi di tanah Israel. Zionisme lahir sebagai reaksi terhadap anti-Semitisme Eropa. Pendiri gerakan ini adalah Theodore Herzl.

³³ The Israeli-Palestinian Conflict (1948 to the Present Day) diakses melalui http://www.historyguy.com/israeli-palestinian_conflict.html#.WXAAH9ycHIU pada 19 Juli 2017

³⁴ Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*, United States of America: Bedford/St. Martin's 2001, h. 326-329

bertentangan dengan Sharif Hussein, yaitu Deklarasi Balfour. Yakni, menyatakan dukungan pemerintahnya untuk “*the establishment in Palestine of a National Home for the Jewish people*”. Pernyataan tersebut memiliki alasan bagi pemerintah Inggris, bahwa dengan mendukung Zionisme merupakan cara termudah untuk mengamankan pengaruh Inggris yang berlangsung lama di wilayah Timur Terusan Suez. Sebagai hasil dari Perang Dunia I, Inggris berhasil memenangkan kontrol atas wilayah Palestina dan Kekaisaran Ottoman. Daerah tersebut dikenal sebagai wilayah mandat Inggris Palestina³⁵.

Gambar 2. 2 *Map of Pre-Palestine: The British Mandate (1921-1923)*



Sumber: Israeli Ministry of Foreign Affairs, Diakses melalui <http://www.jewishvirtuallibrary.org/map-of-the-british-mandate-1921-1923> Pada 6 Maret 2017.

Pada tahun 1930-an, Pemberontakan oleh Palestina Arab terjadi dengan tujuan melawan Inggris yang telah menjalankan otoritas wilayah Palestina setelah tahun 1918. Pemberontakan Palestina Arab diarahkan kepada penduduk Inggris dan

³⁵ Mandat adalah hak otoritas untuk memerintah wilayah yang ditaklukkan.

Yahudi yang bermukim di wilayah Palestina dengan jumlah imigran Yahudi yang semakin bertambah. Inggris berusaha menghentikan pemberontakan Palestina Arab tersebut dengan bantuan Yahudi, namun pertempuran dan permusuhan antara orang Arab dan Yahudi tidak berakhir. Dengan melihat situasi tersebut, pemerintah Inggris mengajukan negosiasi kepada kedua pihak yaitu menggunakan *Partition Plan*.³⁶ Namun, saat itu pihak Palestina Arab menolak negosiasi tersebut dengan alasan ingin memiliki wilayah Palestina secara utuh. Pemberontakan ini berlangsung sampai tahun 1939, ketika pemerintah Inggris melarang Yahudi membeli tanah di wilayah tersebut dan sekaligus untuk mendapatkan dukungan Arab dalam Perang Dunia II.³⁷

Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris yang memegang wilayah otoritas Palestina mundur dan menyerahkan mandat atas wilayah Palestina kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang telah terbentuk. Pada tahun 1947, Dewan Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181 untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua, yaitu 55% wilayah Palestina untuk orang Yahudi, dan 45% wilayah Palestina untuk orang Arab yang menempati wilayah tersebut, dengan Ibukota Yerusalem. Namun orang-orang Arab menolak untuk menyetujui pembagian tersebut. Pada 14 Mei 1948 Israel mendeklarasikan kemerdekaan negara mereka secara sepihak pasca Inggris meninggalkan mandatnya di wilayah Palestina. Wilayah teritorial yang dimiliki merupakan wilayah teritorial yang telah ditentukan oleh *United Nations Special Committee on Palestine* (UNSCOP) yang ditunjuk secara langsung oleh

³⁶ Rencana untuk memecah Palestina menjadi beberapa wilayah untuk Yahudi dan Arab, dengan wilayah Yerusalem termasuk Betlehem berada di bawah kendali Internasional.

³⁷ History of Conflict Palestinian-Israeli, <http://pov-tc.pbs.org/pov/pdf/promiese/promises-timeline.pdf>, diakses pada 8 Maret 2017.

United Nations General Assembly.³⁸ Negara-negara Arab tetangga seperti Irak, Jordania, Libanon, Mesir, Suriah, serta beberapa orang Sudan, Yaman, Maroko, Saudi, Lebanon dan lainnya menilai bahwa deklarasi kemerdekaan negara Israel yang baru merupakan ilegal dan hanya ingin menguasai wilayah Arab, melakukan protes dan mengumumkan perang untuk melawan Israel. Pada saat perang tersebut berakhir, lebih dari 400 desa telah hancur oleh tindakan para pemukim Yahudi dan tentara Israel.³⁹ Perang ini berhasil dihentikan oleh Israel. Sekitar 700.000 orang Palestina melarikan diri dan menjadi pengungsi di Yordania, West Bank, Jalur Gaza, Lebanon, dan Suriah. Hal tersebut disebabkan oleh Israel yang melakukan aneksasi lahan yang luas dan menghancurkan ratusan desa. Perang diantara kaum Yahudi dan Arab masih belum berakhir begitu saja, negara Arab terus melakukan pemberontakan dan Israel juga terus melakukan. Pada tahun 1949, PBB melakukan negosiasi dengan mengeluarkan gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab tetangga yang telah ditandatangani. Namun, gencatan senjata yang telah ditandatangani oleh Israel dan negara-negara Arab tetangga tidak mengarah ke arah perdamaian, tetapi perang diantara pihak-pihak tersebut masih berlanjut hingga tahun 1967. Bagi Israel perang ini dikenal sebagai “Perang Kemerdekaan” dan orang Arab menyebutnya sebagai “Al-Nakba” atau malapetaka.⁴⁰

Pada tahun 1964 para pemimpin Arab membentuk PLO (*Palestine Liberation Organization*). PLO menempatkan pusat perhatiannya terhadap

³⁸ *Op Cit* UN Partition Plan-Resolution 181

³⁹ Gudrun Krämer. *A History of Palestine; From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel*. Translated by Graham Harman and Gudrun Krämer, 2008, hal. 322

⁴⁰ *The New York Times: Endless War*,

<http://www.nytimes.com/2008/05/04/books/review/Margolick-t.html> Diakses pada 24 Desember 2016

masyarakat Palestina dengan membebaskan orang-orang Palestina, mengamankan dan memulangkan kembali orang-orang Palestina yang diasingkan dan mendapatkan kemerdekaan politik dari negara-negara Arab lainnya. Dengan adanya PLO, Palestina dapat menentukan nasib negaranya sendiri dan masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. Di tahun 1967 Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria selama 6 hari⁴¹ dengan tujuan mendapatkan kontrol atas wilayah yang sebelumnya telah dikuasai oleh Mesir, Yordania, dan Syria. Israel berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), Dataran Tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerusalem (Yordania). Israel dengan mudah menghancurkan angkatan udara musuhnya karena dibantu informasi dari CIA (*Central Intelligence Agency* = Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat). Sementara itu angkatan udara Mesir ragu membalas serangan Israel, karena Menteri Pertahanan Mesir ikut terbang dan memerintahkan untuk tidak melakukan tembakan selama dia ada di udara.⁴²

Pada bulan November 1967 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 242, yang memerintahkan untuk melakukan penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam perang 6 hari, pengakuan semua negara di kawasan tersebut, dan penyelesaian secara adil masalah pengungsi Palestina. Kemudian di tahun 1969 Yasser Arafat dari faksi Al-Fatah terpilih sebagai ketua Komite Eksekutif PLO yang memiliki markas di Yordania. Pada tahun 1988, PLO mengubah tujuannya untuk membebaskan seluruh wilayah Palestina dengan

⁴¹ Perang enam hari atau juga dikenal sebagai “*The Six-Day War*”

⁴² Op Cit hal. 18

menggunakan salah satu solusi untuk dua negara. Pada Oktober 1973 Mesir dan Syria menyerang pasukan Israel di Sinai dan Dataran Tinggi Golan pada hari puasa Yahudi, Yom Kippur. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Oktober. Saat itu, Mesir dan Syria hampir menang, namun Israel dibantu oleh Amerika Serikat. Presiden Mesir Anwar Sadat terpaksa melakukan kompromi saat itu, karena tidak siap berhadapan dengan Amerika Serikat. Arab membalas kekalahan itu dengan menutup keran minyak dan mengakibatkan harga minyak melonjak pesat. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 242 dan Perjanjian Camp David tahun 1978, Mesir dan Israel akan menandatangani sebuah perjanjian damai pada tahun 1979, dan pihak Mesir meminta Israel untuk kembali ke wilayah Semenanjung Sinai, dan menyerahkan kembali wilayah Jalur Gaza kepada Palestina. Dengan demikian, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui negara Yahudi tersebut.⁴³

Pada bulan Desember 1987, terjadi pemberontakan Palestina pertama atau disebut *The First Intifada*⁴⁴ yang dilakukan oleh penduduk Palestina di wilayah Tepi Barat (*West Bank*) dan Gaza melawan Israel dan tentaranya yang telah membunuh empat warga sipil pada tahun yang sama sekaligus sebagai protes atas pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza yang terus berlanjut. Pemberontakan Palestina dilakukan dengan melawan pendudukan Israel di wilayah mereka dengan melemparkan batu kepada tentara dan tank milik Israel. *Intifada* melibatkan ratusan ribu orang dan banyak diantaranya tidak memiliki pengalaman perlawanan

⁴³ ISSUE BRIEF: Israel and Egypt: The First Sign of Peace, http://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-politics/aipac-analyses/issue-memos/2006/12/israel_and_egypt_the_first_sign_of_peace.ashx. Diakses pada 24 Desember 2016

⁴⁴ *Intifada* yang berarti “*Shaking off*” dalam bahasa Arab

sebelumnya, termasuk anak-anak dan remaja. Pemberontakan ini berlangsung hingga tahun 1993 ditandai dengan terjadinya pemberontakan oleh warga sipil seperti demonstrasi besar-besaran, pemogokan secara umum, penolakan untuk membayar pajak, memboikot produk-produk Israel, graffiti politik, dan pembentukan “*Freedom Schools*” yang berada di bawah tanah disebabkan militer Israel menutup sekolah reguler sebagai bentuk pembalasan atas pemberontakan. Selain itu tindakan-tindakan pemberontakan lainnya juga termasuk pelemparan batu, bom Molotov, dan pemasangan barikade untuk menghalangi pergerakan pasukan militer Israel.⁴⁵

Kemudian Israel membalas dengan menghukum seluruh penduduk yang melakukan pemberontakan dan memperkenalkan sebuah sistem pos pemeriksaan untuk mengendalikan penduduk dan pergerakan keluar-masuk barang. Memberlakukan jam malam dan menahan ribuan orang Palestina tanpa tuduhan atau pengadilan. Selain itu adanya penyalahgunaan mengenai hak asasi manusia, banyak tahanan yang disiksa dan dianiaya saat berada di dalam tahanan. Perpecahan politik dan kekerasan di dalam masyarakat Palestina meningkat, terutama antara PLO dan fraksi Islam. Kelompok Islam terbesar dan paling kuat saat itu adalah Hamas. Dari tahun 1993 sampai tahun 2005, Hamas menggunakan bom bunuh diri dengan tujuan untuk melancarkan perang melawan Israel sementara pada saat bersamaan memberikan program kesejahteraan sosial untuk orang-orang Palestina. Setelah tahun 2005, Hamas mengubah taktiknya dengan sembarangan dan tidak

⁴⁵ Israel and Palestine: History, Politics and the Pursuit of Peace https://www.ipjc.org/publications/Israel_and_Palestine-Pursuit_of_Peace.pdf, hal. 4. Diakses pada 25 Desember 2016

efektif untuk meluncurkan roket dan mortir,⁴⁶ selain itu karena Israel menjadi aktif dan efektif dalam menghentikan bom bunuh diri. Pada tahun 1997, AS dan Uni Eropa menunjuk Hamas sebagai kelompok Teroris.

Perjanjian Oslo pada tahun 1993 ditandatangani oleh Yasser Arafat dan PM Israel, Yitzhak Rabin di Washington DC dan merupakan dasar negosiasi yang berlangsung di Oslo, Norwegia. Salah satu bagian terpenting dari Perjanjian Oslo adalah terbentuknya pemerintahan Otoritas Palestina yang mendapatkan wewenang atas wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Negosiasi tersebut berhasil menyepakati bahwa Palestina diizinkan untuk menentukan nasib wilayah mereka sendiri, dan menetapkan wilayah pendudukan Palestina dengan daerah otonom baru. Tepi Barat (*West Bank*) dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah A (12%) yaitu meliputi daerah perkotaan di bawah kendali penuh Palestina; Wilayah B (28%) meliputi daerah pedesaan di bawah kontrol sipil *Palestinian Authority* (PA) dan kontrol keamanan Israel; Wilayah C (60% dari Tepi Barat) di bawah kendali penuh Israel. Pada 28 September 1995, Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin menandatangani kesepakatan Interim Israel-Palestina. Dengan adanya kesepakatan ini, para pemimpin PLO dapat kembali ke daerah pendudukannya dan memberikan otonomi kepada bangsa Palestina dengan syarat mengakui Israel dan tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan perjuangan. Namun, kesepakatan ini ditentang oleh Hamas dan sejumlah fraksi radikal Palestina.

Pada *Intifada* Pertama sebagian besar merupakan pemberontakan politik yang didominasi oleh tindakan kekerasan seperti melakukan lempar batu dan bom

⁴⁶ Mortir adalah senjata artileri yang diisi dari depan, dan cara menembakkan peluru dengan kecepatan rendah, jarak jangkauan yang dekat, dan memiliki perjalanan peluru yang tinggi lengkungan parabolnya.

Molotov dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perdamaian yang adil harus dicapai oleh kedua belah pihak. Sedangkan pada *Intifada* Kedua didominasi oleh meningkatnya kekerasan di masing-masing pihak dan mendukung konflik yang terus berlanjut. Masing-masing pihak memiliki persepsi sendiri dan saling meyakinkan sisi keadilan atas tujuannya. Intifada Kedua dibentuk oleh perundingan perdamaian, peraturan keamanan yang berkembang di bawah Persetujuan Oslo, dan sejarah ketegangan diantara Otoritas Palestina dan Israel. Pada tanggal 28 September 2000, Ariel Sharon yang merupakan politisi Israel mengunjungi masjid Al-Aqsa atau kaum Yahudi menyebutnya sebagai “*Temple Mount*” (Tempat Suci) di Yerusalem dilengkapi 1.000 pasukan bersenjata. Tindakan Sharon dinilai memprovokasi demonstrasi besar-besaran Palestina di Yerusalem. Hal ini dikarenakan mengingat seruan Sharon yang ingin mempertahankan aneksasi Israel terhadap Yerusalem Timur. Pada tanggal 29 September 2000, orang-orang Palestina melemparkan batu ke orang-orang Yahudi yang sedang berdoa di Tembok Barat. Israel tidak tinggal diam begitu saja, polisi Israel kemudian melakukan penyerbuan Di Gunung Bait Suci dan membunuh sekitar empat orang dan melukai 200 pengunjung rasa tak bersenjata, dan membunuh tiga orang Palestina lagi di Yerusalem.⁴⁷ Kejadian ini memicu terjadinya tindakan saling membalas penembakan yang dilakukan kedua pihak. Namun, posisi Israel yang memiliki jumlah pasukan bersenjata lebih banyak, sehingga banyak orang dari Palestina jatuh berguguran karena merupakan demonstran yang tak bersenjata. bagi Israel,

⁴⁷ Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict, A Primer, By Joel Beinin and Lisa Hajjar https://web.stanford.edu/group/sper/images/Palestine-Israel_Primer_MERIP.pdf, hal. 11. Di akses pada 25 Desember 2016

melakukan demonstrasi besar-besaran merupakan tindakan agresi, sehingga perlu memperluas penggunaan kekuatan mencaup tank, helikopter tempur, dan bahkan pesawat tempur F-16. Tentara Israel juga menyerang instalasi *Palestinian Authority* di Ramallah, Gaza, dan tempat lainnya. Masyarakat sipil juga terkena serangan bom baik darat maupun udara. Pada November 2000, Hamas, Jihad Islam, PFLP⁴⁸ dan Brigade Martir ber-afiliasi dengan Fatah , mulai melakukan gerakan bom bunuh diri dan operasi senjata lainnya. Lebih dari seratus lima puluh serangan yang terjadi dari tahun 2000 hingga tahun 2005.

Pada Januari 2001, perundingan Palestina-Israel dilanjutkan di Taba (Sinai). Namun konflik masih saja berlanjut dan pembangunan pemukiman secara terus menerus oleh Yahudi. Sehingga negara-negara Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut pada tahun 2002. Rencana tersebut menginginkan Israel mundur ke perbatasan, pembentukan negara Palestina di Gaza dan Palestina dengan ibukota Yerussaelem Timur, dan solusi untuk masalah pengungsi. Sebagai balasannya, negara-negara Arab akan menjalin hubungan normal dengan Israel. Akan tetapi, Israel menolak usulan tersebut.

2. Perkembangan Konflik Palestina-Israel

Perkembangan konflik Israel-Palestina ternyata belum menunjukkan pencapaian perdamaian yang permanen. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aksi militer Israel dan langkah-langkah yang diambil Israel lainnya dalam menghadapi

⁴⁸ *Popular Fron for the Liberation of Palestine* merupakan kelompok teroris yang terbentuk pada tahun 1967 setelah *The Six-Day War*.

bangsa Palestina cenderung memandang tindakan-tindakan ini sebagai pembelaan diri yang sah dalam melawan kampanye terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya Hamas, Jihad Islami, Al Fatah dan lain-lainnya. Banyak yang cenderung percaya bahwa Israel perlu menguasai sebagian atau seluruh wilayah ini demi keamanannya sendiri. Pandangan-pandangan yang sangat berbeda mengenai keabsahan dari tindakan-tindakan dari masing-masing pihak di dalam konflik ini telah menjadi penghalang utama bagi pemecahannya.⁴⁹

Beberapa peristiwa penting dalam konflik Palestina-Israel, sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, masing-masing adalah:⁵⁰

Pertama, pada bulan Maret tahun 2000, Kunjungan pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa memicu kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci umat Islam. Intifadah gelombang kedua pun dimulai. **Ke-dua**, Maret-April 2002 Israel membangun Tembok Pertahanan di Tepi Barat dan diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina. **Ke-tiga**, Juli 2004 Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya. **Ke-empat**, Agustus 2005 Israel mundur secara sepihak dari permukiman Gaza dan empat wilayah permukiman di Tepi Barat, dan dengan paksa memindahkan 8.000 pemukim Yahudi. **Ke-lima**, selama pemilihan tahun 2006 warga Palestina kecewa dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Fatah Mahmoud Abbas. Ketidaksepakatan dan pertarungan

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*.

bersenjata terjadi antara Hamas dan Fatah menyebabkan Hamas memegang kontrol atas wilayah Gaza, pembubaran pemerintah persatuan oleh Fatah dan pembentukan pemerintahannya di wilayah Tepi Barat. Menurut Komisi Independen Hak Asasi Manusia di Palestina, ada 600 orang Palestina terbunuh atas kasus perebutan kekuasaan. **Ke-enam**, Januari-Juli pada tahun 2008 Ketegangan meningkat di wilayah Jalur Gaza, Israel memutus suplai listrik dan gas. Dunia menuduh Hamas tak berhasil mengendalikan tindak kekerasan pada konflik Israel-Palestina dan PM Palestina Ismail Haniyeh berkeras pihaknya tak akan tunduk. **Ke-tujuh**, November 2008 Hamas batal ikut serta dalam pertemuan unifikasi Palestina yang diadakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan di wilayah Israel. **Ke-delapan**, Serangan Israel ke Gaza dimulai 26 Desember 2008. Israel melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas. Korban dari warga sipil berjatuhan. **Ke-Sepuluh**, Mei 2010 Israel memblokir seluruh jalur bantuan menuju palestina, dan pada 30 Mei 2010 Tentara Israel Menembaki kapal bantuan *Mavi Marmara* yang membawa ratusan Relawan dan belasan ton bantuan untuk Palestina.

Israel terus mempertahankan ribuan pasukannya di Gaza dalam rangka menekan jumlah pelepasan roket Qassam ke area dengan populasi sipil yang besar dan menjaga pelepasan Gilad Shalit. Selama September 2005 hingga Juni 2006, diperkirakan ada 7000 hingga 9000 artileri Israel yang ditembakkan ke Gaza, menewaskan 80 orang Palestina selama 6 bulan. Di sisi Palestina sendiri, 1300 roket Qassam dilepaskan menuju Israel sejak September 2000 hingga 21 Desember 2006.

Pada tahun 2007, pihak Palestina menembakkan 220 roket Qassam ke Israel dalam tenggang waktu satu minggu, dan pasukan udara Israel membalas dengan menembakkan misil serta membombardir lokasi peluncuran roket. Pada masa ini, Hamas mengatakan bahwa mereka akan terus melawan serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak Israel. Pada bulan September, Israel menyatakan Gaza sebagai daerah berbahaya menyusul serangan roket Qassam, dan deklarasi ini membuat Israel mampu melarang transfer listrik, bensin, dan suplai lainnya menuju Gaza. Blokade ini secara resmi bertujuan untuk menekan Hamas agar mereka mau mengakhiri serangan roket dan menghabisi suplai yang mereka butuhkan untuk serangan roket yang berkelanjutan. Keputusan ini dinilai sebagai collective punishment bagi warga Palestina.

Pada tahun 2008, bukannya berakhir, serangan roket Qassam ke arah Israel semakin menjadi-jadi dan memaksa Israel untuk menutup total perbatasan. Pada tanggal 23 Januari, mulai terjadi penerobosan perbatasan Gaza-Mesir yang dimulai setelah pasukan bersenjata di Gaza meledakkan sebuah bom di perbatasan Rafah, menghancurkan sebagian dari blokade Israel. Karena kejadian ini, PBB mengestimasi ada sekitar 1,5 juta warga Gaza yang melewati perbatasan menuju Mesir untuk mencari suplai dan makanan.

Pada tanggal 27 Februari 2008, militan Palestina menembakkan lebih dari 40 roket Qassam ke arah Israel selatan yang dibalas dengan tembakan tiga misil ke arah Palestinian Interior Ministry dan menghancurkan gedung tersebut. Esoknya, pesawat Israel melakukan bombardir terhadap sebuah kantor polisi di Gaza dan membunuh beberapa anak kecil. Pada 29 Februari, Israel mulai memobilisasi

operasi darat dan udaranya. Serangan ini menghabisi 100 jiwa dari pihak Palestina selama kurang dari satu minggu, sementara pihak Palestina melemparkan 150 roket yang hanya menewaskan 3 orang Israel. Kemudian pada 19 Juni 2008 menandakan bagian baru dalam *sejarah terjadinya konflik Israel-Palestina di Gaza*, yaitu dimualinya efek perjanjian gencatan senjata selama 6 bulan yang dibantu oleh Mesir. Yang harus dilakukan Hamas adalah menghentikan serangan ke Israel, yang dipenuhi setelah pada awal-awal minggu pertama mereka melemparkan 19 roket dan 18 mortar. Gencatan senjata ini kemudian dilanggar oleh Israel pada 4 November dengan serangan ke daerah Gaza. Setelah gencatan senjata berakhir pada 19 Desember, Hamas kembali meluncurkan 50 hingga 70 roket dan mortar selama tiga hari. Hingga saat ini, konflik ini belum dapat menemukan titik terang.

Selama ini telah terjadi *konflik* yang penuh kekerasan, dengan berbagai tingkat intensitas, konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang berada di balik semuanya. Pada kedua belah pihak dalam berbagai kesempatan, telah muncul kelompok-kelompok yang memiliki pendapat berbeda-beda mengenai penganjuran atau penggunaan taktik-taktik kekerasan maupun anti kekerasan yang aktif, dan ada pula orang-orang yang bersimpati dengan tujuan-tujuan dari pihak yang satu atau yang lainnya, walaupun itu tidak berarti mereka menyetujui taktik-taktik yang telah digunakan demi tujuan-tujuan itu. Lebih jauh, ada pula orang-orang yang merangkul sekurang-kurangnya sebagian dari tujuan-tujuan dari kedua belah pihak. Seperti Al-Fatah dan Hamas memiliki pendapat yang berbeda tentang tujuan-tujuan bagi bangsa Palestina.

3. Kebijakan Luar Negeri Prancis terhadap konflik Israel-Palestina

Salah satu faktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri adalah citra (*image*) atau asumsi. Menurut Coplin, kompleksitas dan ketidakpastian informasi mengenai lingkungan internasional membuat para pengambil keputusan cenderung untuk membangun citra atau asumsi tentang kondisi internasional. Coplin menulis bahwa:

“Dalam banyak hal, asumsi-asumsi disederhanakan menjadi dogma; karena besarnya taruhan yang terlibat, maka para pengambil keputusan politik luar negeri jarang mampu menghindari dari ketidakamanan yang mungkin timbul dari pengkajian ulang citra-citra yang ada. Karena para pengambil keputusan politik luar negeri bergantung kepada citranya dalam mengarahkan perilakunya, perubahan citranya akan membawa konsekuensi-konsekuensi politik yang luas.”

Asumsi yang dibangun oleh para pengambil keputusan kebijakan Luar Negeri Prancis adalah bahwa Prancis merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dari data IMF (International Monetary Fund) pada 2007 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-8. Kemudian Bank Dunia juga memasukkan Prancis sebagai Negara terbesar ke-7 di dunia yang mempunyai Produk Domestik Bruto hingga US\$1.959.745 juta. Selain itu, Prancis merupakan negara yang sangat berperan secara geopolitik di Timur Tengah. Berikut pidato Francois Hollande dalam *Discours à l’occasion de la Semaine des Ambassadeurs par Présidence de la République*, Paris, 30 Agustus 2016 mengenai konflik Timur Tengah⁵¹:

⁵¹ France in The United Kingdom: President Hollande outlines French foreign policy, <https://uk.ambafrance.org/President-Hollande-outlines-French-foreign-policy-26084>. Diakses pada 21 April 2017.

“In the Middle East, I regret to note that the conditions are still not in place for direct negotiations between the Palestinians and the Israelis. But nothing could be worse than the status quo. France therefore took the initiative to organize a conference in Paris, which took place in early June under the chairmanship of Jean-Marc Ayrault. A method was decided. The priority is for the work to lead to concrete measures that can be proposed at the end of the year to the various stakeholders, so that they – and they alone – do the work that is expected of them: namely, negotiation and the solution of which we know the parameters, where two states can live in peace and security.”

a. Middle East Peace Initiative

Melihat situasi dan kondisi di Israel dan wilayah Palestina semakin memburuk tanpa adanya prospek negosiasi, Prancis di bawah pemerintahan Francois Hollande berinisiatif sebagai mediator pada konflik Israel-Palestina dalam *Middle East Peace Initiative*. Ancaman yang berkembang terkait solusi yang diberikan sebelumnya yaitu *two-state solution*, mengenai kelanjutan pembangunan permukiman dan masalah keamanan yang dihadapi masyarakat daerah. Krisis yang melanda wilayah Timur Tengah lainnya seperti Suriah, Irak, Yaman, sama sekali tidak mengurangi signifikansi atau kepentingan simbolis dalam konflik Israel-Palestina. Untuk mencapai tujuan perdamaian, pertama-tama yang harus dilakukan adalah secara bersama-sama menegaskan kembali komitmen pihak pemerintah Internasional yang mendukung terhadap *two-state solution*, yang merupakan satu-satunya cara untuk memastikan solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap konflik tersebut. Kemudian dengan mengumpulkan kontribusi konkret yang harus disiapkan oleh

semua mitra internasional. Kontribusi tersebut dapat menjadi pusat Konferensi yang dilaksanakan pada 03 Juni 2016 dan 15 Januari 2017.⁵²

Selama beberapa dekade, *two-state solution* atau solusi dua negara telah dipandang oleh masyarakat internasional sebagai satu-satunya kesepakatan realistis untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Hal yang paling mendasar adalah dua negara bagian yang terpisah, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai di antara Sungai Barat Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Wilayah ini terbagi secara luas di sepanjang garis gencatan senjata pra-1967 atau "*Green Line*" - mungkin dengan beberapa batas lahan yang dinegosiasikan. Two-state solution akan membentuk sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat bersama Israel - dua negara bagian untuk dua orang. Sebagian besar pemerintah dan badan dunia telah menetapkan *two-state solution* sebagai kebijakan resmi, termasuk Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Otoritas Palestina dan Israel. Tujuan ini telah menjadi dasar perundingan perdamaian selama beberapa dekade.

Upaya internasional untuk menyelesaikan konflik telah mencapai pembahasan seputar "*Road Map*", sebuah rencana yang disponsori oleh Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Rusia. Menurut rencana tersebut, jika Palestina menghentikan kekerasan terhadap orang-orang Israel dan mereformasi sistem politik mereka, sebuah negara Palestina yang nantinya dibentuk dengan batas sementara, disesuaikan selama perundingan selanjutnya. Bagi mereka, orang-orang Israel harus menghentikan aktivitas pemukiman di tanah Palestina. Sampai

⁵² France Diplomatie <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/initiative-for-the-middle-east-peace-process/> Diakses pada 21 April 2017.

2006, *Road Map* belum menghasilkan kesepakatan damai. Namun demikian, pelepasan sepihak oleh Ariel Sharon dari Gaza, di mana Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza dan mengevakuasi permukiman Israel, kemudian hal tersebut yang membangkitkan kembali minat terhadap upaya perdamaian Israel-Palestina seperti *Road Map*.⁵³

Pada tanggal 03 Juni 2016 merupakan konferensi pertama *Middle East Peace*. Perancis menjadi tuan rumah dari 28 delegasi di Paris untuk sebuah pertemuan tingkat menteri yang menandai tahap pertama inisiatifnya yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian di Timur Tengah. Pertemuan ini dibuka oleh Presiden Hollande, diketuai oleh Jean-Marc Ayrault, Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional. Pertemuan tersebut membahas mengenai cara-cara untuk melindungi solusi tersebut, membawa orang-orang Israel dan Palestina bersama-sama dan memulihkan kembali keadaan dan terlaksananya perundingan perdamaian. Kemudian mempersiapkan sebuah konferensi internasional pada akhir tahun 2016. Menetapkan lokasi untuk memberi dorongan baru pada proses perdamaian. Dengan dukungan aktif masyarakat internasional secara keseluruhan.

Setelah pertemuan tingkat Menteri yang diadakan di Paris pada tanggal 3 Juni 2016, para peserta bertemu di Paris pada tanggal 15 Januari 2017 untuk menegaskan kembali dukungan mereka terhadap resolusi konflik Israel-Palestina yang adil dan komprehensif. Kemudian menegaskan kembali bahwa solusi yang di negosiasikan dengan dua negara, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan dalam

⁵³ United Nation Peace Maker, <http://peacemaker.un.org/israel-palestine-roadmap2003>, hal. 2. Diakses pada 21 April 2017.

kedamaian dan keamanan, adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang abadi.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*